

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara-negara yang berlokasi di kawasan Pasifik Selatan memiliki wilayah yang luas yang terdiri dari sebagian besar negara-negara kepulauan yang memiliki angka populasi yang kecil.¹ Kawasan Pasifik Selatan mempunyai sumber daya alam yang memiliki potensial, namun karena keterbatasan kemampuan dari sumber daya manusia dan teknologi, kawasan Pasifik Selatan tidak dapat berdiri sendiri sehingga membutuhkan negara lain.² Sepuluh negara kepulauan Pasifik termasuk di antara 25 negara di mana Bantuan Pembangunan Resmi (ODA) tertinggi yang merupakan bagian pendapatan negara. Oleh karena itu, bantuan luar negeri menjadi instrumen utama dalam dinamika perpolitikan kawasan Pasifik Selatan.³

Definisi dari bantuan luar negeri menurut *Development Assistance Committe* adalah peralihan sumber daya publik dari suatu negara ke negara lain, atau kepada organisasi dengan 25 persen komponennya bertujuan mengembangkan negara-negara miskin.⁴ Menurut pendapat ahli yaitu Hattori, bantuan luar negeri

¹ Matthew Dornan and Jonathan Pryke, "Foreign Aid to the Pacific: Trends and Developments in the Twenty-First Century," *Asia and the Pacific Policy Studies* 4, no. 3 (2017): 386–404, diakses September 2020, <https://ideas.repec.org/a/bla/asiaps/v4y2017i3p386-404.html>

² Terry Irenewaty, "Peranan Amerika Serikat Pasca Dekolonialisasi di Negara-negara Kawasan Pasifik Selatan", *ISTORIA* Vol. 10 No. 4 (2014): 4, diakses pada September 2020, https://www.researchgate.net/publication/330562449_PERANAN_AMERIKA_SERIKAT_PASCA_D_EKOLONISASI_DI_NEGARA-NEGARA_KAWASAN_PASIFIC_SELATAN

³ Dornan and Pryke, 387.

⁴ R D Wulandari, "Bantuan Luar Negeri Australia Dalam Mengatasi Krisis Ekonomi Nauru Tahun 2001-2007," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* (2016): 85–95, diakses September 2020, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-jahi435d54b99bfull.pdf>

merupakan seluruh bentuk barang dan jasa yang dipunyai dan dikelola oleh negara pendonor bantuan di mana memiliki distribusi bagian tertentu bergantung pada tujuan dan kepentingannya.⁵ Berhasil atau tidaknya bantuan luar negeri menurut Bearce dan Tirone dilihat dari berhasil atau tidaknya negara pendonor dalam mengatasi krisis di negara penerima donor.⁶

Negara-negara di Pasifik Selatan menjadi penerima donor bantuan luar negeri dari negara lain. Australia ialah penyedia bantuan luar negeri terbesar di kawasan Pasifik Selatan.⁷ Australia telah menjadi kekuatan dominan di kawasan Pasifik Selatan selama hampir tiga dekade.⁸ Dominasi regional Australia akan berlanjut dalam jangka waktu yang panjang karena posisinya yang menonjol sebagai pendonor bantuan, kekuatan hubungan perdagangan, investasinya dan dalam upaya kerja sama keamanannya.

Pengaruh dominan Australia di kawasan Pasifik Selatan adalah statusnya sebagai mitra dagang utama kawasan dan donor bantuan di wilayah tersebut. Perdagangan barang Australia dengan Pasifik Selatan bernilai lebih dari 7 miliar dollar Australia pada tahun 2013. Menurut statistik Komite Bantuan Pembangunan OECD untuk tahun 2012, donor OECD terbesar berikutnya adalah Amerika Serikat,

⁵ Tomohisa Hattori, "Reconceptualizing Foreign Aid", dalam *Review of International Political Economy* Vol. 8 No. 4 (2001) : 635, diakses September 17, 2020, <https://doi.org/10.1080/09692290110077610>

⁶ David Bearce & Danielle Tirone, "Foreign Aid Effectiveness and the Strategic Goals of Donor Governments", *The Journal of Politics*. 72, (2010) : 837, diakses September 17, 2020, <https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1017/S0022381610000204?mobileUi=0&>

⁷ Dornan and Pryke, 7.

⁸ Vinsensio MA Dugis, "Memahami Peningkatan Kehadiran China Di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Stratejik," *Jurnal Global & Strategis* 9, no. 1 (2018): 1, diakses September, 2020, <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/view/7716>

Selandia Baru, Jepang, dan Prancis. Australia adalah donor terkemuka di kawasan ini dengan selisih yang signifikan.⁹

Kepentingan nasional Australia yang paling utama adalah pada bidang keamanan yaitu untuk memelihara keamanan dan lingkungan strategis pada kawasannya, artinya Australia mempunyai kepentingan langsung untuk menjamin situasi yang aman dan damai pada Negara-negara sekitarnya supaya tetap terpelihara dengan stabil.¹⁰ Untuk mewujudkan kepentingan nasional tersebut, Australia dengan upaya memberi bantuan luar negeri untuk Negara-negara di Kawasan Pasifik Selatan karena kawasan tersebut berbatasan langsung dengan Australia.

Di sisi lain, ada aktor lain yang sedang mengembangkan pengaruhnya di Pasifik Selatan yaitu Tiongkok. Kepentingan nasional Australia terhambat atas hadirnya Tiongkok menjadi aktor baru di Pasifik Selatan yang menjadi rivalitas atas kepentingan nasional Australia. Pengaruh Tiongkok semakin meningkat di negara Pasifik Selatan. Hal tersebut ditandai oleh peningkatan bantuan ekonomi Tiongkok ke negara-negara Pasifik Selatan yang memiliki hubungan bilateral dengan Tiongkok. Tiongkok tercatat sebagai negara pemberi bantuan terbanyak ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat.¹¹

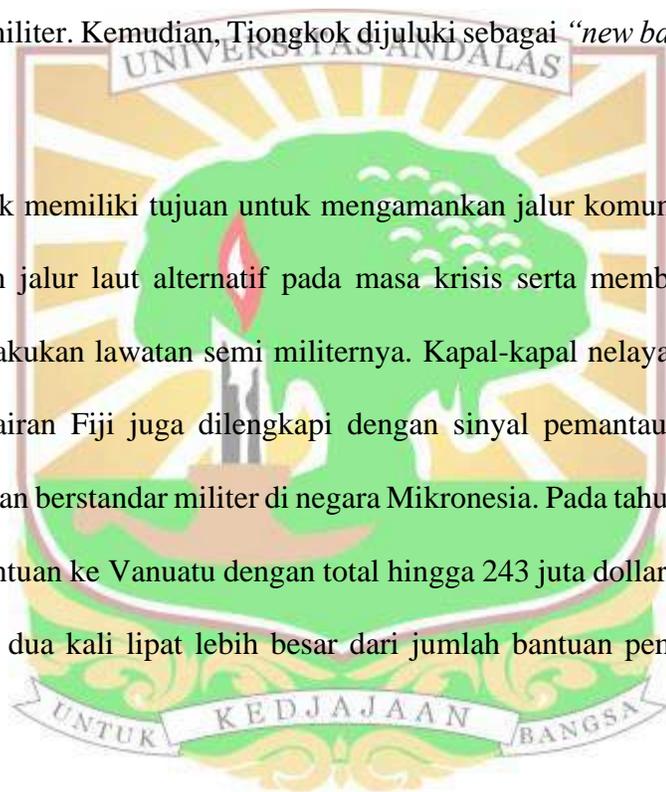
⁹ Stewart Firth, "Guns & Roses: Comparative Civil-Military Relations in the Changing Security Environment" *Springer Singapore; Palgrave Macmillan* (2019) : 439, diakses September 2020, <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-13-2008-8>

¹⁰ Australia, *Defence Strategic Update 2020*, 2020, diakses September 2020, https://www.defence.gov.au/StrategicUpdate-2020/docs/2020_Force_Structure_Plan.pdf.

¹¹ Dugis, 3.

Program bantuan global Tiongkok telah berkembang seperti halnya pengeluaran ekonomi dan pertahanannya. Bantuan luar negeri Tiongkok pada kawasan ini terpusat pada negara-negara yang mengakui *One China Policy* yaitu Cook Islands, Samoa, Tonga, Fiji, Papua new guinea, dan Vanuatu.¹² Tiongkok menawarkan berbagai bantuan mulai dari bantuan keuangan, membangun infrastruktur hingga meningkatkan militer. Kemudian, Tiongkok dijuluki sebagai “*new banker*” di kawasan Pasifik Selatan.

Tiongkok memiliki tujuan untuk mengamankan jalur komunikasi laut dengan cara mendirikan jalur laut alternatif pada masa krisis serta membangun pelabuhan militer dan melakukan lawatan semi militernya. Kapal-kapal nelayan Tiongkok yang berlayar di perairan Fiji juga dilengkapi dengan sinyal pemantau intelijen dengan tujuan pengintaian berstandar militer di negara Mikronesia. Pada tahun 2018, Tiongkok memberikan bantuan ke Vanuatu dengan total hingga 243 juta dollar Amerika Serikat. Jumlah tersebut dua kali lipat lebih besar dari jumlah bantuan pemerintah Amerika Serikat.¹³



Akibat pengaruh Tiongkok yang mengalami peningkatan di kawasan Pasifik Selatan bahkan di indikasikan berusaha mengembangkan pangkalan militer di Vanuatu. Dalam menanggapi laporan upaya Tiongkok untuk membangun kehadiran angkatan laut di Vanuatu, Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull mengutarakan

¹² Dornan and Pryke, 1.

¹³ Denghua Zhang, “China’s Diplomacy in the Pacific: Interests, Means and Implications,” *Security Challenges* 13, no. 2 (2017): 33, diakses September 2020, <https://www.jstor.org/stable/26457717>

"Kami akan sangat prihatin dengan pendirian pangkalan militer asing di negara-negara kepulauan Pasifik tersebut" dan Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan bahwa "Kami mengambil posisi yang kuat di Pasifik melawan militerisasi." ¹⁴

Dengan meningkatnya jumlah investasi Tiongkok di Vanuatu, tentu hal tersebut menjadi kekhawatiran bagi Australia karena secara geografis wilayah Vanuatu berdekatan dengan pantai timur Australia. Republik Vanuatu berada di 1750 km dari pantai timur Australia. Vanuatu ialah salah satu negara yang ikut serta untuk memprakarsai transportasi global Tiongkok yaitu *One Belt One Road* (OBOR). Tiongkok juga telah mengeluarkan anggaran bantuan 100 juta dollar AS untuk melakukan perbaikan di pelabuhan Luganville. ¹⁵

Perdana menteri Australia Malcolm Turnbull menyatakan akan memandang penuh perhatian tentang pendirian pangkalan militer asing di pasifik dan mengambil posisi yang kuat melawan militerisasi. Bantuan Tiongkok di negara-negara pasifik sebagaimana dilacak oleh *Lowy Institute Mapping Foreign Assistance* di pasifik meningkat secara signifikan dari tahun 2006 hingga 2016, dengan total komitmen bantuan kumulatif sebesar 1,78 miliar dollar AS selama periode tersebut. Dalam merespons dari meningkatnya pengaruh Tiongkok, Australia dan Selandia Baru melawan pengaruh Tiongkok dengan meningkatkan keamanan regionalnya. Namun,

¹⁴ Bruce Vaughn, "Australia and New Zealand React to China 's Growing Influence in the South Pacific", *CRS Insight*, (2018), diakses pada September 2020, <https://fas.org/sgp/crs/row/IN10938.pdf>

¹⁵ "China aid wins influence in Pacific despite rising concerns", *Financial Times*, November 14, 2019, diakses September 2020, <https://www.ft.com/content/bf2cfd72-f6c1-11e9-9ef3-eca8fc8f2d65>

pada tahun 2012 Australia merasa terancam, hal tersebut terlihat dari pernyataan Sekretaris Parlemen Australia untuk Urusan Kepulauan Pasifik (Australian's Parliamentary Secretary for Pacific Islands Affairs), Richard Marsles secara gamblang menyatakan peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Pasifik Selatan berpotensi menjadi ancaman pada Australia.¹⁶

Australia, Selandia Baru, dan Pasifik telah menandatangani perjanjian keamanan baru selama pertemuan 18 negara Pacific Island Forum pada September 2018, sebuah langkah yang dikaitkan pengamat Australia dan Selandia Baru dengan kekhawatiran tentang kemampuan negara mereka untuk menjaga hubungan dengan wilayah tersebut dalam menghadapi meningkatnya keterlibatan Tiongkok.¹⁷ Dengan beberapa upaya Australia dalam meningkatkan keamanannya, tentu terlihat jelas bahwa Australia merasa terancam dengan kehadiran Tiongkok. Dengan meningkatnya pengaruh Tiongkok tentu menjadi ancaman bagi Australia karena dapat menyebabkan kehilangan kontrol Australia terhadap kawasan Pasifik Selatan. Oleh karena itu, penulis akan melihat bagaimana respon Australia terhadap meningkatnya kehadiran investasi dan bantuan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan.

1.2 Rumusan Masalah

Kebangkitan Tiongkok di kawasan Pasifik Selatan menjadi ancaman bagi Australia sebagai aktor tradisional yang memiliki pengaruh dan peran penting di

¹⁶ Siti Nadjiha, "Persaingan China-Australia dalam Perebutan Pengaruh di Kawasan Pasifik", Jurnal Asia Pasifik Studies, Vol. 4 No. 1 (2020) : 40, diakses Oktober 2020, <https://doi.org/10.33541/japs.v4i1.1640>

¹⁷ Dugis, 3.

kawasan. Kehadiran Tiongkok ditandai dengan adanya investasi terhadap negara-negara Pasifik Selatan dalam jumlah yang besar. Hal ini menjadikan Tiongkok tercatat sebagai pendonor ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat. Hal ini dilakukan Tiongkok sebagai upaya untuk memperkuat perdagangan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, kemampuan pemerintah dan militer. Meningkatnya pengaruh Tiongkok tersebut menjadi ancaman bagi Australia karena mempengaruhi pengaruh dan posisi kepemimpinan Australia di kawasan Pasifik Selatan. Berdasarkan ancaman tersebut, pemerintah Australia merespon untuk mempertahankan dominasinya di kawasan Pasifik Selatan dengan menambah bantuan ekonomi dan memperkuat aliansi militernya untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan oleh penulis, lalu pertanyaan penelitian yang akan penulis jawab melalui penelitian ini ialah bagaimana kebijakan luar negeri Australia dalam Merespon Pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan kebijakan luar negeri Australia dalam merespon pengaruh Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan.



1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan dalam studi Hubungan Internasional terkait kajian tentang kebijakan luar negeri suatu negara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan rujukan bagi pemerintah Australia dan para pembuat kebijakan luar negeri dalam merespon ancaman dari dominasi negara lain.

1.6 Studi Kepustakaan

Pada analisis penelitian, peneliti berupaya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin yang relevan atas permasalahan yang hendak diteliti. Peneliti mengumpulkan beberapa karya tulis ilmiah sebagai acuan untuk memecahkan anomali dalam penelitian ini. Adapun beberapa karya tulis yang dijadikan peneliti sebagai rujukan adalah sebagai berikut :

Penelitian pertama, merujuk pada artikel yang berjudul *Memahami Peningkatan Kehadiran China di Pasifik Selatan: Perspektif Realisme Strategik* yang ditulis oleh Vinsenso M.A. Dugis.¹⁸ Artikel ini menjelaskan bahwa yang diperlihatkan Tiongkok melalui kehadiran di kawasan Pasifik Selatan ialah bagian pada strategi global Tiongkok dalam mengkaji pluralitas global dan menanggapi beragam peluang kepentingan yang dapat dimaksimalkan dari kawasan Pasifik Selatan. Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui kelanjutan dari perubahan arah politik luar negeri yang dilakukan Tiongkok sejak berakhirnya Perang Dingin. Kehadiran ini

¹⁸Dugis, 4.

memperhitungkan berbagai kepentingan-kepentingan Tiongkok. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada kepentingan dan perubahan arah politik luar negeri Australia.

Penelitian kedua ditulis oleh Pathul Azim dengan judul *Kepentingan Australia dalam Kerja sama Keamanan Force Posture dengan Amerika Serikat*. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kepentingan Australia dalam menginisiasi *force posture* yang dilakukan bersama Amerika Serikat.¹⁹ Hasil dari penelitian ini adalah Australia memiliki dua kepentingan utama yaitu sebagai strategi keamanan Australia untuk mengimbangi kekuatan militer Tiongkok dan untuk mengamankan stabilitas keamanan kawasan Asia Pasifik sebab kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang penting bagi Australia.

Penelitian ini membantu penulis untuk mengetahui bahwa Australia memiliki pandangan bahwa kebangkitan militer Tiongkok memberikan ancaman pada Australia di kawasan Asia Pasifik. Perkembangan militer Tiongkok pada saat ini gencar dalam membangun kekuatan Angkatan Laut pada wilayah-wilayah strategis menunjukkan kekuatan modernisasi militer Tiongkok. Dengan meningkatnya militer Tiongkok, Australia merasa terancam karena Australia tidak memiliki kekuatan yang dapat menyeimbangi kekuatan Tiongkok. Sedangkan, pada penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada meningkatnya militer Tiongkok tetapi juga meningkatnya bantuan luar negeri Tiongkok

¹⁹ Pathul Azim, "Kepentingan Australia dalam Kerja sama Keamanan Force Posture dengan Amerika Serikat" (2018), : 3, diakses September 2020, <http://eprints.unram.ac.id/id/eprint/10915>

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Peter J. Connolly yang berjudul *Engaging China's New Foreign Policy in the South Pacific*.²⁰ Pada penelitian ini dijelaskan bahwa kebangkitan Tiongkok menunjukkan perlu adanya kerja sama yang lebih besar oleh Tiongkok dan negara-negara barat seperti Australia. Teori 'peaceful rise' tidak lagi menjelaskan situasi dan dampak global Tiongkok karena telah melewati ambang kekuatan ekonomi, kemampuan militer dan pengaruh regional. Dalam hubungan Australia-Tiongkok, ada banyak peluang bantuan dan keamanan. Keterlibatan militer dapat mempromosikan pemahaman yang lebih baik dalam hadir dan dapat menghindari atau meredakan bentrokan di masa depan. Sedangkan pada penelitian ini, menurut penulis tidak adanya peluang Australia akan beraliansi dengan Tiongkok.

Penelitian keempat yang ditulis oleh Windarti Febrianti yang berjudul *Kepentingan Australia dalam Intervensi di Kepulauan Salomon melalui Regional Assistance Mission to Solomon Island (RAMSI)*.²¹ Artikel ini menjelaskan bahwa kebijakan intervensi yang dilakukan oleh Australia dalam menyelesaikan konflik di Kepulauan Salomon memiliki tujuan dari bidang keamanan politik yaitu dikhawatirkan Kepulauan Salomon menjadi "failed state" yang akan berdampak pada keamanan Australia sendiri karena letaknya berdekatan, tujuan kedua adalah pada pembentukan

²⁰ Peter J. Connolly, "Engaging China's New Foreign Policy in the South Pacific," *Australian Journal of International Affairs* 70, no. 5 (2016): 484, diakses Oktober 2020, <https://doi.org/10.1080/10357718.2016.1194805>

²¹ Windarti Febriani, "Kepentingan Australia Dalam Intervensi Di Kepulauan Solomon Melalui Regional Assistance Mission To Solomon Islands (RAMSI)," *Jurnal Analisis Hubungan Internasional* 7, no. 2 (2018): 236, diakses Oktober 2020, http://repository.unair.ac.id/72508/3/JURNAL_Fis.HI.38%2018%20Feb%20k.pdf

RAMSI yaitu upaya Australia agar mempertahankan kekuatan regionalnya di kawasan Pasifik.

Artikel ini membantu penulis menggambarkan peralihan kebijakan luar negeri Australia pada penyelesaian konflik dengan pembentukan RAMSI. Penelitian ini memakai teori kekuatan regional yang memiliki definisi suatu negara yang mempunyai kekuatan material atau kemampuan di suatu wilayah geografis tertentu dan mencoba untuk melaksanakan kepemimpinan dalam rangkaian regional. Kebijakan luar negeri Australia memutuskan untuk terlibat dalam intervensi RAMSI menjadi cara untuk meningkatkan kekuatan dan keinginan untuk mendominasi yang memastikan kegiatan politik. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas kemampuan dan kekuatan Australia di kawasan Pasifik Selatan tidak hanya di Kepulauan Salomon.

Penelitian kelima ditulis oleh Johni Robert Verianto Korwa yang berjudul *Kebangkitan China melalui Belt and Road Initiative dan (Re)konstruksi Hubungan Internasional dalam Sistem Westphalia*.²² Pada penelitian ini bermaksud untuk membuktikan kebangkitan Tiongkok menggunakan konsep filosofis Tiongkok mengenai dunia yang dijuluki 'all under heaven' (tianxia). Kebangkitan Tiongkok menjadi ancaman pada supremasi dan dominasi Amerika Serikat pada kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Kebangkitan Tiongkok dalam abad ke-21, dominasi 'free trade' dengan 18 aktor secara bilateral dan regional (China FTA Network, 2019) dan dugaan

²² Johni Robert Korwa Verianto, "Kebangkitan China Melalui Belt and Road Initiative Dan (Re)Konstruksi Hubungan Internasional Dalam Sistem Westphalia," *Jurnal Hubungan Internasional* 8, no. 1 (2019): 2, diakses Oktober 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/5800>

bahwa Tiongkok akan menggeser posisi AS juga menjadi negara dengan ekonomi terbesar dunia. Sedangkan pada penelitian ini penulis membahas dugaan Tiongkok akan menggeser posisi sekutu Amerika Serikat yaitu Australia di kawasan Pasifik Selatan.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Teori Balance of Threat

Sekilas teori *balance of power* dan *balance of threat* terlihat sama, namun keduanya memiliki perbedaan yaitu di mana menurut teori BOP, negara akan selalu mempertahankan keberlangsungan hidup jangka panjang entitasnya pada sistem internasional yang anarki. Negara melakukan *balancing* merupakan kondisi alami di sistem internasional pada saat tidak meratanya distribusi kekuasaan terutama pada bidang militer. Menurut Morghentau, dalam mengukur *power* dilihat dari geografi, politik, ekonomi dan kultural sosial di mana didalamnya pula termasuk kualitas penduduk, ekonomi, pemerintahan, diplomasi dan paling utama adalah militer.

Teori *balance of threat* bertentangan dengan teori *balance of power*, menurut teori *balance of power*, negara hendak selalu mengimbangi kekuatan dari negara lain yang lebih besar darinya. Namun, BOP tidak dapat menjelaskan mengapa ada negara yang memiliki kekuatan lebih lemah tidak merasa terancam oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar.²³ Oleh karena itu, pada tahun 1987 Stephen M. Walt melopori teori *balance of threat* atas perbaikan dari teori *balance of power*. Dia pertama

²³ Ole Wæver, "Waltz's Theory of Theory", *International Relations - INT RELAT*, (2009):201-222, diakses Oktober 2020, <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0047117809104635>

kali fokus pada strategi *balancing* dan *bandwagoning* lalu memberikan kontribusi pada teori ini dengan tidak berpusat pada unit kekuatan seperti kekuatan militer atau kekuatan ofensif tapi berfokus pada kekuatan ancaman.²⁴

Menurut Walt, negara menggunakan strategi *balancing* berdasarkan *power* yang dimiliki, namun, dari ancaman negara lain yang dianggap mengancam. Teori *balance of threat* memfokuskan pada cara perimbangan untuk mengatasi ancaman yang ada, bukan untuk mengimbangi kekuatan lawan.²⁵ Terdapat empat hal yang menjadi daya ukur kekuatan negara yang memberikan dampak ancaman, yaitu *aggregate power* (kekuatan negara), *geographic proximity* (kedekatan geografis), *offensive power* (kapabilitas militer yang bersifat ofensif) dan *perceived aggressiveness* (mampu menunjukkan sifat yang agresif terhadap lawan).²⁶

Aggregate power ialah kekuatan yang relatif yang dimiliki oleh negara, yang meliputi kemampuan industry, kemajuan teknologi, kapasitas militer dan kekuatan ekonomi berdasarkan total GDP suatu negara.²⁷ Dengan kata lain, *aggregate power* ialah jumlah sumber daya yang dimiliki negara. Selanjutnya ialah *Geographic Proximity* adalah ancaman yang disebabkan oleh kedekatan secara geografis. Semakin dekat jarak antarnegara, maka akan semakin besar kapasitas ancaman. Kemampuan negara pada memproyeksikan kekuatan disebabkan oleh jarak geografis. Berikutnya

²⁴ Vanilla Planifolia, "Strategi Rebalancing Amerika Serikat Di Kawasan Asia-Pasifik," *Jurnal Hubungan Internasional* 6, no. 1 (2017) : 18, diakses Oktober 2020, diakses Oktober 2020, <https://journal.umy.ac.id/index.php/jhi/article/view/2939>

²⁵ Stephen M Walt, *The Origins of Alliance*, (Cornell University Press, JSTOR, 1987), diakses pada 22 September, 2020, www.jstor.org/stable/10.7591/j.ctt32b5fc

²⁶ Planifolia, 5.

²⁷ Planifolia, 19.

adalah *offensive power* yaitu kapabilitas militer yang bersifat menyerang oleh suatu negara akan mengancam negara lain.²⁸ Berikutnya adalah *Aggressive Intention* ialah kapasitas suatu negara dalam menerapkan kebijakan atau strategi yang mengarah ke negara lain.²⁹

Keempat aspek tersebut ialah cara yang dipelopori oleh Stephen M. Walt untuk membuktikan ancaman yang ditimbulkan oleh negara lain. Peneliti menganggap teori *balance of threat* oleh Stephen M. Walt relevan untuk menjadi kerangka pemikiran untuk analisis penelitian ini. Karena Tiongkok terbukti telah melakukan ekspansi ke Pasifik Selatan. Tiongkok memenuhi empat aspek yang dapat menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman kepada Australia berdasarkan teori *balance of threat* tersebut.³⁰

1.7.2 Strategi Bandwagoning atau Balancing

Menurut teori *balance of threat*, dalam merespon ancaman negara memutuskan melakukan upaya aliansi menggunakan 2 (dua) strategi utama, yaitu *bandwagoning* dan *balancing*. Kedua strategi tersebut dapat dilakukan negara jika mendapatkan ancaman dari negara lain. Pada strategi *bandwagoning*, negara melakukan pendekatan dengan negara yang memberikan ancaman. Negara menggunakan strategi *bandwagoning* agar dapat menghindari serangan yang ditujukan bagi dirinya dengan mengalihkannya ke pihak lain.³¹ *Bandwagoning* terjadi ketika suatu negara memilih

²⁸ Walt, 5.

²⁹ Planifolia, 8.

³⁰ Firth, 5.

³¹ Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power", *International Security* Vol. 9 No. 4 (1985): 7, diakses Oktober 2020, <https://doi.org/10.2307/2538540>

untuk menyesuaikan diri secara strategis terhadap kekuatan yang mengancam sebagai upaya untuk menghambat ancaman yang ada. Apabila negara beraliansi dengan negara sumber ancaman, maka negara dengan kekuatan terbesar akan dihargai apabila negara tersebut menampakkan kekuatan dan ancaman yang potensial.

Sedangkan dalam strategi *balancing*, negara memilih beraliansi dengan pihak lain untuk menghadapi negara yang memberikan ancaman. Negara beraliansi untuk melindungi diri mereka sendiri dari negara lain yang dapat memberikan ancaman. Negara melakukan *balancing* karena mempertaruhkan kelangsungan hidup mereka sendiri jika gagal membendung potensi hegemon yang berpotensi menjadi terlalu kuat.³² Negara yang berupaya mendominasi negara lainnya akan menimbulkan oposisi yang meluas. Apabila *balancing* menjadi kecenderungan dalam hubungan internasional, maka negara yang terancam akan memprovokasi negara lainnya untuk beraliansi melawan negara pengancam.

1.8 Metodologi Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggambarkan metode penulisan kualitatif sebagai wujud pemaparan data-data yang didapatkan dalam bentuk tulisan ilmiah dan mendeskripsikan fakta aktual yang tergambar dari hasil penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis analisa deskriptif yang mengacu pada pengumpulan data. Peneliti menjelaskan interpretasi data-data yang didapat dari penelitian terlebih

³² Walt, 5.

dahulu, buku, jurnal ilmiah, artikel, website yang mengkaji tentang objek penelitian yang menghubungkan data tersebut dengan data lainnya juga pemilihan sumber yang dianggap relevan sehingga menciptakan pendapat dan tulisan yang bisa dipertanggung jawabkan.

1.8.2 Batasan Penelitian

Agar pembahasan tidak melebar, penulis memberi batasan penelitian yaitu semenjak tahun 2012 hingga 2020 pada saat Tiongkok mulai meningkatkan pengaruhnya di kawasan Pasifik Selatan.

1.8.3 Unit dan Level Analisis

Unit analisis dalam penelitian adalah unit atau objek yang perilakunya hendak peneliti deskripsikan, ramalkan dan jelaskan.³³ Unit analisis disebut juga variabel dependen yaitu variable yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari variabel independen. Unit analisis dalam penelitian ini adalah kebijakan luar negeri Australia. Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisis. Unit eksplanasi disebut juga variabel independen yaitu variabel yang mempegaruhi atau menjadi sebab terjadinya perubahan variabel dependen. Pada penelitian ini unit eksplanasinya ialah meningkatnya pengaruh Tiongkok di Pasifik Selatan.

Agar dapat memahami dan mempelajari fenomena hubungan internasional yang rumit dan kompleks, perlu memusatkan studi kita pada tingkat analisis atau level analisis yaitu pada level faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena hubungan

³³ Mochtar Mas'oe'd, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi*, (Jakarta: LP3ES, 1990) :

internasional. Tingkat analisis atau level analisis adalah tumpuan posisi dari unit yang akan diteliti. Pada penelitian ini tingkat analisisnya adalah Negara.³⁴

1.8.4 Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan yang dikumpulkan dari sumber primer dan sekunder, sumber primer didapatkan dari situs resmi pemerintah Australia dan buku putih pemerintahan Australia, sumber sekunder didapatkan dari berita, jurnal dan majalah.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan data guna memperoleh suatu bentuk keteraturan. Data-data penelitian yang telah dihimpun peneliti kemudian diinterpretasikan oleh peneliti guna menjawab pertanyaan penelitian. Data-data yang telah diseleksi akan diinterpretasikan dan disajikan kembali oleh peneliti dalam bentuk analisis dengan memberikan gambaran latar belakang pengetahuan untuk menjawab pertanyaan dengan menghubungkannya dengan data-data ilmiah menggunakan kerangka konseptual *balance of threat* yang dipelopori oleh Stephen M. Walt.

Secara singkat, peneliti menganalisis bahwa, kebijakan luar negeri Australia untuk melakukan *balancing* disebabkan oleh adanya ancaman dari negara lain yaitu Tiongkok. Teori *balance of threat* memfokuskan pada usaha perimbangan untuk mengekang ancaman yang ada, bukan untuk mengimbangi kekuatan lawan.³⁵ Terdapat

³⁴ Ambarwati dan Subarno Wijatmadja, *Pengantar ilmu hubungan internasional*, (Malang : Intrans Publishing, 2016)

³⁵ Walt, 10.

empat hal yang dapat menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman, yaitu *aggregate power* (kekuatan negara), *geographic proximity* (kedekatan geografis), *offensive power* (kapabilitas militer yang bersifat ofensif) dan *perceived aggressiveness* (mampu menunjukkan sifat yang agresif terhadap lawan). Tiongkok memenuhi empat aspek yang dapat menjadi daya ukur kekuatan negara untuk memberikan dampak ancaman kepada Australia berdasarkan teori *balance of threat* tersebut.

1.9 Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, pengelolaan data dan sistematika penulisan.

Bab II : Sejarah Keberadaan Australia di Kawasan Pasifik Selatan

Pada bab ini menggambarkan beberapa kepentingan Australia di Kawasan Pasifik Selatan. Bab ini menggambarkan apa saja yang dilakukan Australia untuk mencapai kepentingan nasionalnya mulai dari bidang ekonomi, politik dan keamanan.

Bab III : Sejarah Keberadaan Tiongkok di Kawasan Pasifik Selatan

Pada bab ini menggambarkan sejarah Tiongkok hadir di Kawasan Pasifik Selatan hingga menjadi negara pendonor ketiga setelah Australia dan Amerika Serikat



di Kawasan Pasifik Selatan. Bab ini menjelaskan apa saja kepentingan nasional Tiongkok dan menjelaskan apa saja yang dilakukan Tiongkok untuk mencapai kepentingannya. Selanjutnya, bab ini menjelaskan apa saja kepentingan Australia yang terancam oleh Tiongkok.

Bab IV : Analisis Respon Australia terhadap peningkatan pengaruh Tiongkok

Pada bab ini mendeskripsikan hasil analisis kebijakan luar negeri Australia menggunakan konsep *balance of threat* dan mendeskripsikan hasil keputusan kebijakan luar negeri Australia sebagai respon terhadap ancaman dari Tiongkok.

Bab V : Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran, yang hendak mencakup ide-ide dan pengetahuan terpenting dari penelitian ini dan memberikan garis besar tentang kontribusi apa yang mampu diberikan terhadap lingkungan akademis maupun pemangku kepentingan.

